

Commissioned by



HIGH LEVEL PANEL for
**A SUSTAINABLE
OCEAN ECONOMY**

BLUE PAPER

Ringkasan bagi Pengambil Keputusan

Mewujudkan Keadilan Laut

Laut sangatlah penting bagi semuanya—laut menghasilkan oksigen dan makanan, menyimpan karbon dan panas, menawarkan ruang untuk kegiatan ekonomi dan rekreasi, serta terus menginspirasi dan mendukung budaya dan kesejahteraan.

Secara global, nilai aset laut utama telah diperkirakan sebesar US\$24 triliun dan nilai layanan yang diperoleh yakni antara \$1,5 triliun dan \$6 triliun per tahun.¹

Namun demikian, akses ke sumber daya dan sektor laut jarang didistribusikan secara merata. Banyak manfaatnya dikumpulkan oleh segelintir orang, sementara sebagian besar kerugian dari pengembangan ditanggung oleh golongan paling rentan. Ketidakadilan adalah fitur sistemis dari ekonomi laut saat ini. Ini tertanam dalam sistem politik dan ekonomi yang ada, hasil dari warisan sejarah dan norma yang berlaku. Ini menimbulkan tantangan lingkungan global dan berdampak negatif pada kesejahteraan manusia. Sekalipun tersedia untuk mendukung keadilan, sebagian kerangka hukum tidak dikembangkan dengan memadai. Dalam praktiknya, sebagian besar kebijakan laut tidak berpihak pada keadilan dan berkontribusi pada pola ketidakadilan saat ini.

Menangani ketimpangan yang ada, mencegah meluasnya ketidakadilan laut, dan mendukung keadilan, baik dalam maupun antarnegara, merupakan bagian tak terpisahkan dari ekonomi laut yang berkelanjutan. Merancang strategi serta kebijakan baru yang menawarkan pandangan lebih terpadu dan holistik tentang sumber daya laut kita serta lebih banyak keterlibatan beragam pengguna juga menawarkan kesempatan untuk mendapatkan jalur pengembangan di masa depan yang lebih adil dan stabil.

Apa yang dimaksud dengan keadilan laut?

Keadilan laut meliputi fokus pada penyediaan manfaat sosial, budaya, dan ekonomi serta mencakup berbagai sektor dan dimensi keadilan terkait laut. Dokumen Spesifikasi Teknis ini menyoroti beberapa cara yang dapat ditimbulkan ketidakadilan dan/atau tindakan yang dapat diambil untuk mendukung keadilan:



Perikanan: Penerapan kebijakan panduan internasional yang efektif dapat membantu memperbaiki distribusi tangkapan ikan komersial global yang tidak adil. Di skala lokal, masyarakat nelayan kecil, khususnya penduduk asli, perempuan, dan subkelompok minoritas lainnya, sering kali memiliki kekuatan politik yang relatif terbatas, cenderung tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, serta menanggung akibat ekosistem yang terkuras secara tidak adil.



Laut lepas: Terbatasnya keterlibatan negara berkembang dalam kegiatan laut lepas dan pengambilan keputusan terkait—dalam hal perikanan, mineral langka, sumber daya genetik, dan kemajuan ilmiah—menimbulkan permintaan atas keadilan, kewajaran, dan keseimbangan.



Infrastruktur pesisir: Proyek infrastruktur serta pengembangan pesisir dan lepas pantai harus dirancang untuk meminimalkan biaya dan meningkatkan manfaat bagi masyarakat rentan.



Perusahaan transnasional: Pengoperasian perusahaan transnasional yang bertanggung jawab dalam rantai pasokan global dapat meningkatkan keadilan melalui praktik dan pelaporan yang lebih baik (termasuk transparansi dan penelusuran yang lebih baik terhadap pelanggaran hak asasi manusia) serta melalui keterlibatan aktif dengan pembuat kebijakan.



Perubahan iklim: Perubahan iklim akan menimbulkan serta memperburuk tantangan kesetaraan dan keadilan yang dihadapi oleh negara yang rentan. Oleh karena itu, keadilan harus segera menjadi pertimbangan di semua sektor dan di semua tingkat politik, serta bahwa kebijakan penerapan keadilan segera diterapkan.

Ekonomi laut yang berkelanjutan harus memperhatikan lingkungan, melindungi hak asasi manusia, meningkatkan kesejahteraan manusia, menstimulasi inklusi dan keadilan gender, serta memprioritaskan pengakuan, keragaman, dan akses yang setara ke sumber daya untuk memberikan kesempatan yang sejalan dengan pengembangan berkelanjutan. Ekonomi berkelanjutan tersebut juga harus menangani praktik korupsi dan penggelapan pajak, menuntut praktik bisnis yang bertanggung jawab dan transparan, serta menciptakan ekonomi bersama yang memfasilitasi redistribusi kekayaan dan manfaat yang adil. Ekonomi laut yang berkelanjutan harus menyadari batas lingkungan dan sosial mengenai pertumbuhan serta mempertimbangkan penghentian pertumbuhan jika diperlukan.


Penelitian baru dalam mendukung High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy menilai keadilan ekonomi laut global saat ini dan menjabarkan pendekatan untuk penyertaan beragam pelaku dalam agenda ekonomi biru dan distribusi manfaat serta perlindungan laut yang adil dari bahaya bagi pihak yang paling rentan². Dokumen Spesifikasi Teknis ini menangani masalah keadilan dan kesetaraan laut yang ada di dan di berbagai skala (dari tingkat global dan nasional hingga masyarakat dan subkelompok) serta melibatkan hubungan (bilateral atau lainnya) di antara berbagai jenis pelaku (pemerintah, masyarakat sipil, lembaga internasional, dan perusahaan swasta) dengan tingkat kekuasaan, kapasitas, dan insentif yang berbeda untuk menangani keadilan lautan.

Mengubah alur terkini dari ketidakadilan yang konsisten dan meningkat memerlukan kepemimpinan yang kuat, tata kelola inklusif, serta perencanaan khusus dan jangka panjang yang dimulai dengan komitmen yang jelas terhadap keadilan sebagai bagian tak terpisahkan dari ekonomi laut berkelanjutan dan dan hubungan dalam dan antar negara.

Tabel 1 mencantumkan serangkaian rekomendasi pada spektrum ambisi, mulai dasar hingga **transformatif**. Rekomendasi ini dimaksudkan sebagai pelengkap dan penguatan tindakan untuk mendukung keadilan laut di masa depan.

Secara keseluruhan, rekomendasi ini bertujuan untuk menyampaikan jalan menuju ekonomi laut yang berkelanjutan dan adil.

Tabel 1. Ikhtisar Rekomendasi untuk Mencapai Keadilan di Ekonomi Laut Berkelanjutan

KEADILAN DI EKONOMI LAUT BERKELANJUTAN 		
KEAMANAN <i>Tidak ada penyesalan</i>	MENGUTAMAKAN KEADILAN <i>Melakukan hal yang benar</i>	PENDEKATAN TRANSFORMATIF <i>Kebijakan yang berani</i>
<ul style="list-style-type: none"> ■ Dalam kegiatan pengembangan dan prakarsa konservasi, melibatkan dan menyertakan negara berkembang serta masyarakat setempat dalam proses pengambilan keputusan. ■ Mengenali hak, peran, dan kebutuhan perempuan, penduduk asli, nelayan kecil, individu penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas lainnya serta meningkatkan hambatan akses yang ada. ■ Melindungi hak asasi manusia dan hak penduduk asli. ■ Menangani korupsi dan penggelapan pajak. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mengenali, melindungi, dan menerapkan keadilan serta hak akses. ■ Membangun kapasitas setempat—termasuk akses ke teknologi yang murah dan terjangkau—untuk menetapkan kesetaraan peluang. ■ Memahami kausalitas sosial-ekologi di lingkungan laut untuk menetapkan tanggung jawab dan kewajiban, dan mengamankan distribusi keuntungan sosial yang setara. ■ Meminta, mewajibkan, dan mendorong praktik bisnis yang transparan dan bertanggung jawab. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Menciptakan ekonomi laut bersama yang memfasilitasi redistribusi kekayaan dan manfaat. ■ Mendemokraskan pengetahuan laut. ■ Menciptakan proses tata kelola inklusif dengan memadukan pendapat dan visi setempat ke dalam rencana ekonomi laut pada semua skala. ■ Mengetahui pembatasan lingkungan dan sosial terhadap pertumbuhan dan mempertimbangkan penghentian pertumbuhan.

Dibentuk pada September 2018, Panel Tingkat Tinggi untuk Ekonomi Laut Berkelanjutan (HLP-High Level Panel) merupakan sebuah inisiatif beranggotakan 14 kepala pemerintahan dan negara yang berkomitmen mempercepat penerapan solusi nyata dan praktis demi kesehatan dan kekayaan laut yang lebih baik. Inisiatif ini sekaligus mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB demi masa depan masyarakat dan dunia yang lebih baik. HLP terdiri dari Presiden atau Perdana Menteri dari Australia, Kanada, Chile, Fiji, Ghana, Indonesia, Jamaika, Jepang, Kenya, Meksiko, Namibia, Norwegia, Palau dan Portugal serta didukung oleh kelompok ahli, dewan penasihat dan sekretariat yang membantu analisa, komunikasi dan pelibatan pemangku kepentingan. Sekretariat HLP dikelola di World Resource Institute.

Ikhtisar ini merupakan ringkasan dari makalah yang disiapkan oleh HLP sebagai bagian dari seri Blue Paper yang meneliti tantangan-tantangan mendesak terkait kelautan dan ekonomi. Laporan ini ditulis oleh lebih dari 160 pakar ilmiah terkemuka dari 47 negara. Mereka merangkum pemikiran ilmiah mutakhir tentang solusi kelautan inovatif di bidang teknologi, kebijakan, tata kelola dan keuangan yang dapat mempercepat hubungan dengan laut secara berkelanjutan dan saling menguntungkan. Seri Blue Paper akan diterbitkan secara rutin antara November 2019 sampai Juni 2020, dan akan disediakan sebagai Kompendium Blue Paper HLP yang sudah disunting menjelang Konferensi Kelautan PBB (UN Ocean Conference) di Lisbon pada Juni 2020.

Argumen, temuan dan rekomendasi yang dimuat dalam Blue Paper merupakan pandangan penulis. Meskipun HLP mendukung hasil temuan dan peluang untuk bertindak yang diajukan, anggota HLP tidak diminta untuk mempromosikan Blue Paper dan tidak seharusnya diasumsikan demikian.

Untuk informasi lebih lanjut, termasuk makalah lengkap, kunjungi www.oceanpanel.org.

Endnotes

- 1 Cicin-Sain, B. 2015. "Goal 14—Conserve and Sustainably Use Oceans, Seas and Marine Resources for Sustainable Development"; Hoegh-Guldberg, O. 2015. *Reviving the Oceans Economy: The Case for Action—2015*. Gland, Switzerland: World Wide Fund for Nature; Lillebo, A.I., C. Pita, J. Garcia Rodrigues, S. Ramos and S. Villasante. 2017. "How Can Marine Ecosystem Services Support the Blue Growth Agenda?" *Marine Policy* 81: 132–42; OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). 2016. *The Ocean Economy in 2030*. Paris: OECD.
- 2 Österblom, H., C.C.C. Wabnitz, D. Tladi et al. 2019. *Towards Ocean Equity*. Washington, DC: World Resources Institute. Available online at www.oceanpanel.org/blue-papers/how-distribute-benefits-ocean-equitably.